

Eksistensi Etika Politik Islam dalam Pemerintahan

Nurul Azisah Syahrani Haris¹, Andi Muh Reza Caecar Arfan², Andi Muhammad Aflah³, Kurniati⁴

Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar Alauddin Makassar , Indonesia
E-mail: 10200122058@uinalauddin.ac.id¹, 10200122062@uin-alauddin.ac.id²,
10200122045@uin-alauddin.ac.id³, Kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract. *Ethics is a field of philosophy that discusses the moral principles that govern human behavior, while politics deals with decision-making and the management of power in society. In Islam, political ethics is a concept that regulates human relationships in the political world. Islamic political ethics consists of a collection of moral values and principles that should guide everyone involved in political activities, both as citizens and leaders. Islamic political ethics has a strong relevance in the context of politics and governance. The moral values in Islam can serve as guidelines for leaders and citizens in building a better society. Despite the challenges faced, ongoing efforts to implement Islamic political ethics are considered essential in building an ideal and ethical government. It is important to build a just, prosperous, and moral society through the application of Islamic political ethics, which includes principles such as justice, equality, democracy, deliberation, freedom, and respect for the rights of others. In addition, this journal reviews the methods Ali Shari'ati used to make his assertions about the importance of Islam as a basic political ethic. A just, moral, and prosperous government can be achieved through the application of Islamic political ethics. Political ethics is not a convoluted system, but rather a number of noble values that are in line with the principles of Islam.*

Keywords: *Islamic political ethics, governance, Islam, state*

Abstrak. Etika merupakan bidang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia, sedangkan politik berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam Islam, etika politik merupakan konsep yang mengatur hubungan antar manusia dalam dunia politik. Etika politik Islam terdiri dari kumpulan nilai dan prinsip moral yang seharusnya menjadi panduan bagi setiap orang yang terlibat dalam aktivitas politik, baik sebagai rakyat maupun pemimpin. Etika politik Islam memiliki relevansi yang kuat dalam konteks politik dan pemerintahan. Nilai-nilai moral dalam Islam dapat berfungsi sebagai pedoman bagi para pemimpin dan warga dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi, upaya yang terus dilakukan untuk menerapkan etika politik Islam dianggap penting dalam membangun pemerintahan yang ideal dan beretika. Penting untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral melalui penerapan etika politik Islam, yang mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, demokrasi, musyawarah, kebebasan, dan penghormatan hak orang lain. Selain itu, jurnal ini meninjau metode yang digunakan Ali Syari'ati untuk membuat pernyataannya tentang betapa pentingnya Islam sebagai etika politik dasar. pemerintahan yang adil, bermoral, dan sejahtera dapat dicapai melalui penerapan etika politik Islam. Etika politik bukanlah suatu sistem yang kompleks, melainkan seperangkat nilai-nilai luhur yang patut diterapkan dalam perilaku politik, hukum, undang-undang, dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini menyoroti pentingnya memperkuat keberadaan etika politik Islam dalam pemerintahan dan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini.

Kata kunci: etika politik islam, pemerintahan, islam, negara

1. PENDAHULUAN

Etika adalah bidang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Ini mencakup hal-hal seperti apa yang benar dan salah, serta bagaimana membuat keputusan dan bertindak apa yang benar. Adapun Aristoteles menekankan bahwa etika harus didasarkan pada realitas materi dan pengalaman konkret manusia. Dalam pandangan ini, etika bukanlah sekadar konsep teoretis, tetapi juga harus diterapkan secara

praktis dalam kehidupan sehari-hari. (Habibi 2020) Politik adalah bidang yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan pengambilan keputusan yang mengatur masyarakat. Fokus politik adalah bagaimana kekuasaan digunakan, kebijakan dibuat, dan masyarakat diorganisasikan.

Etika dan politik dianggap saling terkait dan sulit dipisahkan dalam kehidupan manusia. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku manusia, sedangkan politik berkaitan dengan pengorganisasian dan pengendalian kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks politik, keputusan dan tindakan yang diambil oleh para politisi dan pemerintah memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Etika berperan penting dalam mengarahkan tindakan politik agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat. Etika mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kebebasan, dan kebaikan dalam pengambilan keputusan politik. Sebaliknya, politik juga mempengaruhi etika. Kekuasaan politik dapat mempengaruhi standar moral dan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat. (Hadi dan Arrasyid 2021) Dalam konteks Islam, politik dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan umat Muslim. Agama Islam memiliki panduan dan prinsip-prinsip yang mengatur tata cara berpolitik, baik dalam hal pemerintahan, kebijakan publik, maupun partisipasi politik umat Muslim. Kebijakan politik yang diterapkan dalam suatu negara dapat mempengaruhi praktik keagamaan, kebebasan beragama, perlindungan hak-hak umat Muslim, dan perkembangan komunitas Muslim secara keseluruhan. (Pattimahu 2019) Dalam masyarakat, peran etika politik terbatas pada menyediakan alat teoretis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab; hal ini tidak didasarkan pada emosi, prasangka atau apriori, tetapi pada rasionalitas, objektivitas dan argumentasi. (In'amuzzahidin, 2016)

Etika politik Islam, yang merupakan bagian dari ajaran Islam, terdiri dari kumpulan nilai dan prinsip moral yang seharusnya merupakan pedoman bagi seluruh peserta kegiatan politik, baik sebagai warga negara maupun sebagai pemimpin. Etika politik Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral. Meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi, etika politik Islam memainkan peran penting dalam membangun pemerintahan yang ideal dan bermoral. Namun, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat keberadaan etika politik Islam dalam pemerintahan. Dalam Islam, etika politik mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, demokrasi, musyawarah, kebebasan, dan saling menghormati hak orang lain. (Amin, Ilmu, dan Vol 2022)

Etika membantu membangun aturan, norma, dan kaidah sosial yang mengatur pergaulan antarwarga masyarakat. Mereka juga berkontribusi dalam mengembangkan sifat

sosial manusia dan membantu menjaga keberlangsungan kehidupan bersama. (Nizar 2018) Di era modernisasi, dengan segala kemajuan yang membawa perubahan dan mempengaruhi nilai-nilai moral, pandangan ideologi yang berbeda mendominasi kehidupan, dan tentunya kita hidup dalam masyarakat yang semakin majemuk, juga dari segi moralitas sehingga kita menjadi bingung. mana yang diikuti oleh moralitas, maka tugas etika sangatlah penting, sebagaimana disebutkan Magnis Suseno, yaitu terciptanya masyarakat yang semakin baik.(Prayogi 2014)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode kepustakaan sebagai kerangka utama untuk pengumpulan data. Data yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, literatur, dan publikasi ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan akses yang luas terhadap informasi yang relevan dan memungkinkan analisis yang mendalam terhadap topik penelitian. Dengan menggunakan sumber-sumber tertulis ini, peneliti dapat menyelidiki konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, mendapatkan wawasan yang beragam, dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang subjek yang diteliti. Metode ini memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan argumen dan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang ada dalam literatur ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Etika Politik Islam Pada Pemerintahan Kerajaan Islam

Dalam bukunya Tahdzib Al-Akhlakk, Ibnu Miskawaih secara sistematis membahas etika pada beberapa topik utama, yaitu: jiwa, kebaikan dan kebahagiaan, keadilan, cinta dan persahabatan, serta penyakit jiwa dan pengobatannya. Dalam kehidupan ini ada dua nilai yang menentukan tindakan seseorang, yaitu nilai baik dan nilai buruk (bad and good). Penilaian ini berlaku untuk semua bidang kehidupan manusia.. (Dahlan 2021) Penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam islam merupakan suatu keniscayaan, termasuk dalam penyelenggaraan negara, karena nabi mendirikan negara Madinah, berdasarkan nilai-nilai moral yang wajib di ikuti oleh setiap umat islam. Dalam islam, kajian etika politik tidak mempunyai tujuan semata-mata untuk memahami dan mengkritisi ideologi, juga bukan bagian dari filsafat, melainkan merupakan bagian integral hukum syariah yang wajib di amalkan dalam kehidupan seseorang. Khusus nya di bidang politik dan penyelenggaraan negara.

Nabi Muhammad menggabungkan peran sebagai pemimpin agama dan politik dengan mengadopsi strategi dan konsepsi tertentu, dengan cara antara lain ialah:

1. Mendirikan Masjid: Salah satu strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan politik. Masjid menjadi tempat berkumpulnya umat Muslim untuk melaksanakan ibadah, diskusi, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan umat dan negara. Dalam masjid, Nabi Muhammad memberikan pengajaran agama, memberikan petunjuk politik, dan menerima kunjungan dari berbagai lapisan masyarakat.
2. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar: Nabi Muhammad membangun persaudaraan antara Muhajirin (orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah) dan Ansar (penduduk asli Madinah) sebagai upaya menyatukan umat Muslim dan memperkuat solidaritas sosial. Melalui persaudaraan ini, Nabi Muhammad menjalin hubungan erat antara kedua kelompok dan mengatasi perbedaan suku, etnis, dan latar belakang mereka.
3. Kerjasama Antar Komponen Penduduk: Nabi Muhammad mendorong kerjasama antara komponen penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam membangun negara yang pluralis. Dalam konstitusi Madinah, Nabi Muhammad mengatur hak-hak dan kewajiban semua komunitas di Madinah, termasuk perlindungan terhadap hak-hak minoritas non-Muslim. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam kepemimpinan politik Nabi Muhammad.
4. Pembentukan Dasar-Dasar Politik, Ekonomi, dan Sosial: Nabi Muhammad secara aktif terlibat dalam pembentukan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Madinah yang baru. Melalui konsultasi dan musyawarah dengan umat Muslim dan warga Madinah lainnya, Nabi Muhammad membentuk piagam Madinah sebagai konstitusi yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, Nabi Muhammad juga melakukan reformasi sosial dan ekonomi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Vachruddin 2021)

Demokrasi sangat bergantung pada musyawarah. Rasulullah dan para khulafa al Rasyidin telah menerapkannya dalam sistem politik Islam. Dengan demikian, para pemimpin muslim terus memungkinkan musyawarah dalam situasi yang sulit bagi umat Islam. Memang, musyawarah tidak selalu menghasilkan konsensus, bahkan dapat menyebabkan ketidakpastian dan kekacauan. Meskipun demikian, kita harus berpendapat bahwa ini adalah metode yang paling menguntungkan bagi mayoritas pengambilan keputusan. Selain itu, karena urusan

kenegaraan berkaitan dengan kepentingan umum. (Syam 2015)

Khulafau Rasyidin juga menjunjung tinggi prinsip kebebasan dalam beragama. Mereka melindungi hak-hak warga negara mereka dan memberi mereka kebebasan beribadah. Mereka tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam atau memperlakukan orang yang tidak beragama Islam dengan adil. Khulafaur Rasyidin juga menunjukkan etika pemimpin yang baik, mereka hidup sederhana dan tidak menerima hadiah hadiah atau suap dari pihak lain. Mereka tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam atau memperlakukan orang lain dengan adil; sebaliknya, mereka melindungi hak-hak warga negara mereka dan memberi mereka kebebasan untuk beribadah.

Dalam hal hubungan internasional, Khulafaurasyidin membuat perjanjian yang menerapkan keadilan dan menghormati kedaulatan negara lain. Secara umum, etika politik Islam di bawah pemerintahan Khulafaurasyidin didasarkan pada keadilan, kebebasan beragama, konsultasi, integritas, dan hubungan diplomatik yang baik. Mereka berusaha menjalankan kepemimpinan dengan mengikuti ajaran Islam dan memperjuangkan kepentingan umat Muslim dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Islam, etika politik juga dianggap sebagai bagian dari ibadah dan harus dilakukan dengan cara yang sama seperti ibadah. Ketika pemerintahan dibangun berdasarkan nilai-nilai politik Islam, mereka akan mendorong pengembangan bidang ilmu pengetahuan yang mencakup ilmu alam dan pasti, serta ilmu sosial dan agama. Dia juga dikenal sebagai penggemar dari berbagai bidang ilmu Yunani, termasuk filsafat. Ia mendirikan perpustakaan Bait al-Hikmah yang berisi buku-buku Islam dan buku-buku asing untuk memenuhi kebutuhan akademik.

Lima prinsip etika politik Islam yang harus dipegang oleh pemimpin dan politisi. Berikut adalah penjelasan singkat dari lima prinsip tersebut:

1. Agama sebagai landasan etika politik pemimpin Muslim: Agama dianggap sebagai landasan utama bagi etika politik pemimpin Muslim, karena mereka harus mematuhi perintah Allah dan menerapkan pelajaran agama dalam tindakan dan keputusan politik mereka.
2. Amanat dalam Berkuasa: Pemimpin Muslim memiliki amanah yang besar dalam memegang kekuasaan. Mereka harus bertanggung jawab secara moral dan bertindak sesuai dengan kepentingan umum, menjaga keadilan, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
3. Adil dan bijaksana dalam hukum: Pemimpin Muslim diharapkan adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Mereka harus memberlakukan hukum secara objektif,

tanpa pilih kasih, dan dengan mempertimbangkan manfaat umum. Cerdas dan berkompoten pada bidangnya: Pemimpin Muslim diharapkan memiliki kecerdasan dan kemampuan yang diperlukan dalam politik dan kepemimpinan. Mereka harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengelola urusan politik dengan baik.

4. Bermusyawarah dan Toleransi: Pemimpin Muslim diharapkan menerapkan prinsip musyawarah dan toleransi saat membuat keputusan politik. Untuk mencapai keputusan yang baik dan mempertahankan harmoni dalam masyarakat, mereka harus mengedepankan dialog, konsultasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Dalam Islam, prinsip-prinsip ini mencakup hal-hal seperti moral, tanggung jawab, keadilan, kecerdasan, dan kerjasama. Mereka dianggap penting untuk melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan politik. (Farid 2017)

Aturan perpolitikan dalam Islam menurut pandangan Hamka harus didasarkan pada hukum alam, hukum moral, dan hukum fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan politik, prinsip-prinsip yang berlaku secara alamiah, moral, dan sesuai dengan fitrah manusia harus diikuti. Aturan perpolitikan Islam juga harus melayani kepentingan individu, bukan hanya kepentingan kelompok atau negara. (Amril, Putri, dan Andrea 2023) Islam memiliki seperangkat aturan perpolitikan yang komprehensif, tertuang dalam Al-Quran, Hadits, dan ijtihad para ulama. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan bermoral, serta memandu umat Muslim dalam berpolitik dengan cara yang benar. (Luthfi, 2011).

Etika politik Islam memiliki peran penting dalam membangun pemerintahan yang mengutamakan etika dan moralitas. Dalam kerajaan Islam, etika politik menjadi bagian integral dari syariat yang wajib diamalkan oleh setiap Muslim, terutama dalam lapangan politik dan penyelenggaraan kenegaraan. Dalam contoh yang disebutkan, Kerajaan Islam Madinah membawa perubahan rohani dan filosofis yang menciptakan dunia baru pada masa Nabi Muhammad SAW. Madinah berusaha menjayakan semangat dan cita-cita ini dengan cara yang unik. Peran etika politik dalam kerajaan Islam sangat penting untuk membangun pemerintahan yang mengedepankan etika, moralitas, akhlak karimah, persamaan, dan rasa hormat-menghormati. Dengan menerapkan nilai-nilai etika politik Islam, pemerintahan dapat mencapai tujuan yang adil, bermoral, dan sejahtera bagi masyarakat. Etika politik Islam tidak hanya menjadi sistem yang berbelit-belit, tetapi merupakan kumpulan nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam perilaku politik, undang-undang, hukum, dan kebijakan dalam pemerintahan. Kesimpulannya, dalam konteks pemerintahan kerajaan Islam, etika politik Islam memiliki

peran sentral dalam membentuk tatanan sosial dan politik yang adil, bermoral, dan berkeadilan. Etika politik Islam adalah panduan moral yang harus diikuti oleh pemimpin dan warga dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

3.2 Peran Etika Politik Islam Pada Pemerintahan Negara Republik

Politik dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai kekuasaan semata, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan secara umum. Politik dalam Islam memiliki peran dan fungsi ganda, yaitu berbuat baik terhadap sesama manusia dan mempertimbangkan kebaikan masyarakat secara luas. Etika politik dalam konteks Islam memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip moral dan ajaran agama. Islam mengajarkan tentang etika dan moral melalui Al- Quran, yang menjelaskan prinsip dasar politik Islam dan memberikan pedoman tentang perilaku yang baik dan buruk. Oleh karena itu, politik dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu memperhatikan kepentingan umat manusia secara keseluruhan.(Sugiyono 2022)

Penerapan etika politik islam dalam negara republik dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai nilai etis islam ke dalam kebijakan politik. Namun perlu diingat pentingnya untuk menyesuaikannya dengan kondisi dan konsensus nasional yang berlaku di negara tersebut. Untuk menerapkan etika politik Islam dalam republik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial budaya negara, nilai-nilai Islam, dan sistem politik yang berlaku. Etika politik berbicara tentang hal-hal seperti integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan bagaimana masyarakat terlibat dalam proses politik. Etika politik juga mencakup pertimbangan moral tentang bagaimana pemerintah membuat keputusan dan bertindak.(Waspiyah et al. 2022)

Etika diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan rukun. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, sangat penting untuk memahami dan menerapkan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika politik Islam menekankan betapa pentingnya berpartisipasi aktif dalam urusan publik dan kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip Islam. Masyarakat Muslim diminta untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang baik dan bertanggung jawab, menjunjung tinggi keadilan, toleransi, dan persatuan.

Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya penegakkan hukum dan aturan yang berlaku secara adil dan merata untuk semua warga negara. Sangat penting untuk menghindari korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, menurut etika politik Islam. Diharapkan bahwa pemimpin dan warga negara Muslim bertindak jujur, menjaga amanah, dan menghindari segala

bentuk kekacauan politik. Dalam keseluruhan, etika politik Islam mendorong individu dan komunitas Muslim untuk berperilaku baik, bertanggung jawab, dan beradab dalam kehidupan bernegara. Tujuan etika politik ini adalah untuk menciptakan tatanan politik yang adil, bermoral, dan sejahtera, yang dapat menghasilkan kemajuan yang berkelanjutan dan harmonis bagi seluruh masyarakat.(Sutisna 2019)

Etika kehidupan berbangsa menekankan betapa pentingnya kesadaran ketertiban masyarakat, ketentraman dan ketertiban, yang hanya dapat dicapai dengan menaati peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi keadilan. dari. Menurut etika politik islam setiap warga negara harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif di hadapan hukum. Mereka mendukung dan mencegah pelanggaran prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam Kode Etik dan Kode Etik Hakim disusun oleh Mahkamah Agung dan Komisi Kehakiman.(Jayus 2019) Tujuan hukum meliputi tiga nilai, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, seringkali nilai-nilai ini tidak ditekankan secara menyeluruh, dan salah satu nilai dapat terlupakan. Oleh karena itu, pemahaman telah muncul bahwa nilai keadilan adalah nilai yang paling utama dalam dunia hukum. Untuk mencapai keadilan yang lebih baik, diperlukan upaya dalam mewujudkan penegakan hukum yang responsif di Indonesia. Hukum harus mengabdikan pada masyarakat itu sendiri dan bukan hanya memperhatikan teks Undang-Undang Dasar semata.

Dalam kesimpulannya, bahwa keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan tidak akan terwujud tanpa upaya manusia untuk mendapatkannya. Keadilan sebenarnya ada di mana-mana, begitu pula dengan hukum. Namun, hukum nasional tidak dapat menjadi jaminan terwujudnya keadilan. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.(Nasir et al. 2023) Hukum juga memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Hukum juga dapat memberikan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila adalah bagian yang melekat dalam budaya, norma, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar negara, ideologi nasional, dan jati diri bangsa. Namun, perubahan teknologi, informasi, dan pengaruh asing yang semakin tidak terbanding dapat mempengaruhi nilai-nilai tersebut, terutama bagi generasi muda.(Mindarto 2018)

Keadilan sangat penting secara substantif dalam setiap penegakan hukum. Setiap perkara hukum mengandung pelanggaran hak, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan kepentingan warga negaranya agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Proses kepolisian melibatkan dua pihak yang berkonflik yang berusaha mencari kebenaran untuk

menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam prakteknya, kebenaran formal yang dicari berdasarkan peraturan perundang-undangan belum selalu dapat mencerminkan kebenaran bagi mereka yang mencari keadilan. Tidak semua pihak yang bersengketa merasa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dalam putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di mata dan hati masyarakat. Oleh karena itu perlu dikaji asas-asas kebenaran terkait hak atas perlindungan hukum. Untuk mencapai keadilan substantif, penting untuk mempertimbangkan keadilan agama dan hukum Islam dalam proses kepolisian. (Sukmana, Kurniati, dan Sultan 2023)

Politik tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian kekuasaan formal dalam pemerintahan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kesenjangan sosial, perlakuan sewenang-wenang, dan kejahatan politik lainnya dapat disebabkan oleh kekurangan fungsi etika politik. Oleh karena itu nilai-nilai etika dan moral dianggap sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Proses politik, baik dari individu maupun lembaga politik, sangat dipengaruhi oleh etika politik. Etika membentuk inti dari kehidupan bermasyarakat, dan sebagai individu politik, manusia membutuhkan etika untuk memastikan bahwa perilaku sosial mereka sesuai dengan moralitas dan etika. Etika sangat penting untuk membangun masyarakat yang berperadaban dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Kelabilan dan kesenjangan sosial dapat terjadi ketika nilai-nilai etika diabaikan, terutama di kalangan masyarakat bawah. Maka dari itu etika politik Islam sangat penting dalam politik untuk membantu para politisi dan pejabat pemerintah menjalankan tanggung jawab dan tanggung jawab mereka. (Achmad 2019)

Etika politik Islam sangatlah penting dalam membentuk ketatanegaraan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Etika politik memberikan acuan dan pedoman bagi individu dan masyarakat dalam mengatur perilaku dan tindakan mereka. Dalam konteks ketatanegaraan, etika politik berfungsi sebagai barometer peradaban sebuah negara. Tujuan dari etika politik Islam adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan adil yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral universal seperti keadilan, kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan menerapkan etika politik juga diharapkan terciptanya sistem politik yang stabil, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan umum. Formalisasi hukum Islam di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengacu pada konstitusi negara dalam melakukan formalisasi hukum Islam. Paradigma transformatif dipandang sebagai pilihan yang tepat dan memberikan prospek yang lebih besar dalam upaya formalisasi hukum Islam dalam

sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, formalisasi hukum Islam secara simbolik, terutama dalam upaya mendirikan negara Islam Indonesia, hanya akan mengalami distorsi dan tidak memberikan banyak manfaat bagi umat Islam di Indonesia. (Rahmatunnair 2015)

Dalam perspektif Islam pemerintah diharapkan memiliki fleksibilitas yang luas dalam menjalankan tanggung jawabnya, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat secara umum. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan dan kepentingan umum masyarakat menurut etika politik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. **Kedaulatan Rakyat:** Pemerintah yang sah adalah pemerintah yang berdaulat rakyat, yang dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kemakmuran dan kepentingan umum.
2. **Keadilan:** Semua warga negara harus dilayani dengan adil dan tidak diskriminatif oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya dan peluang sama untuk semua orang.
3. **Kebersamaan:** Pemerintah harus memprioritaskan program yang bermanfaat bagi seluruh rakyat daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.
4. **Akuntabilitas:** Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakannya. Pemerintah harus jujur dan terbuka terhadap masyarakat.

Pemikiran Mohammad Natsir sebab etika politik Islam dapat dilihat dari dua hal utama. Pertama, Natsir berpendapat bahwa politik bukanlah tujuan utama dalam Islam, melainkan sarana untuk Menegakkan syariat Islam di suatu negara. Kedua, Natsir terlibat dalam pembentukan Masyumi sebagai sarana untuk mewujudkan syariat Islam berbasis demokrasi di Indonesia. Selain itu, pemikiran Natsir tentang etika politik Islam ini mencakup pemahaman tentang negara dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan nasional. Natsir mengatakan bahwa Islam tidak menyediakan sistem administrasi negara yang ideal, tetapi ia setuju bahwa demokrasi adalah sistem yang paling cocok untuk orang Muslim. Selain itu, Natsir berbicara tentang cara memilih pemimpin, bagaimana menangani pemberontak, bentuk dan struktur negara, dan bagaimana menjadi politikus yang berbasis Islam. (Novianto dan Prihatin 2018)

Islam memberikan landasan etika dan moral dalam politik melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama. Berikut beberapa cara Islam memberikan landasan etika dan moral dalam politik:

1. **Keadilan:** Islam mendorong penerapan prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik. Keadilan menjadi landasan utama dalam menjalankan

pemerintahan dan mengambil keputusan politik. Politik yang berlandaskan keadilan akan memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

2. **Amar Ma'ruf Nahi Munkar:** Islam mendorong umatnya untuk mendorong yang baik (amar ma'ruf) dan mencegah yang buruk (nahi munkar). Dalam konteks politik, hal ini berarti politisi dan pemimpin Muslim bertanggung jawab untuk mempromosikan kebaikan dalam masyarakat dan mencegah perilaku yang buruk atau merusak.
3. **Akhlak Mulia:** Islam mengajarkan pentingnya akhlak mulia dalam politik. Pemimpin Muslim diharapkan memiliki sifat-sifat seperti kejujuran, keadilan, amanah (tepercaya), dan kesederhanaan. Etika dalam politik Islam menekankan pentingnya integritas pribadi dan moralitas dalam menjalankan tugas politik.
4. **Musyawahah:** Prinsip musyawarah atau syura merupakan bagian integral dari politik Islam. Keputusan politik yang diambil harus melibatkan konsultasi dan partisipasi aktif dari masyarakat, dengan tujuan mencapai keputusan yang adil dan berlandaskan pada konsensus.

Dengan menggunakan politik sebagai sarana, prinsip-prinsip Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, menciptakan tatanan sosial yang adil, berkeadilan, dan berdasarkan pada nilai-nilai etika dan moral Islam.(Pattimahu 2019) Etika politik menjadi dasar yang kuat untuk menjaga keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan di negara republik di mana rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat memegang kekuasaan politik. Untuk menjaga integritas dan kualitas sistem politik, etika politik sangat penting. Etika politik mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku politik individu dan kelompok dalam hal pemerintahan dan pengambilan keputusan politik. Etika politik juga memiliki peran penting dalam membangun negara republik yang stabil, adil, dan sejahtera. Untuk mencapai kemerdekaan dan kemajuan bangsa, para pemimpin dan politisi harus menerapkan etika politik yang baik dan melibatkan masyarakat secara aktif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan etika politik Islam dapat membantu menciptakan pemerintahan yang adil, bermoral, dan sejahtera. Nilai-nilai moral ini tetap relevan hingga hari ini dan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi para pemimpin dan warga untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks pemerintahan Kerajaan Islam, etika politik memiliki peran penting dalam membangun pemerintahan yang mengutamakan etika dan moralitas. Etika politik Islam adalah

ide tentang penggunaan kekuasaan dan pengaruh yang dipandu oleh akhlak, persamaan, dan rasa hormat-menghormati yang kuat. Kesimpulan tersebut menekankan pentingnya etika politik dalam Islam sebagai pedoman bagi individu dan pemerintahan dalam mengambil keputusan politik dan membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral.

Perbedaan antara etika politik Islam dalam pemerintahan kerajaan dan republik dari sudut pandang sistem pemerintahan. Dalam pemerintahan kerajaan, konsep kepemimpinan otoriter dan monarkis, dengan kekuasaan terpusat pada seorang raja atau sultan yang dianggap memiliki legitimasi agama, lebih menonjol. Dalam pemerintahan republik, sebaliknya, etika politik Islam lebih menekankan pada prinsip-prinsip pribumi. Oleh karena itu, perbedaan ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang dalam setiap konteks pemerintahan, serta peran dan kewenangan yang berbeda dalam sistem pemerintahan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D. (2019). Etika Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an, 1–19.
- Amin, A., & Syari 'Ati, A. (2022). Nalar Politik Islam Ali Syari 'Ati Sugiyono Stai Al Aqidah Al Hasyimiyah Jakarta. *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 5(2), 422–432.
- Amril, A., Putri, E. W., & Andrea, D. (2023). Integrasi Islam dan Politik dalam Perspektif Hamka. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 25(1), 74. <https://doi.org/10.22373/substantia.v25i1.17097>
- Annisa, S. (2015). Etika Politik Dalam Sejarah Umat Islam, 151(1), 10–17.
- Batubara, M., & Manik, F. N. (2023). Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6080–6090.
- Bolong, B. (2018). Etika Politik Ulama. *Millah: Journal of Religious Studies*, 18(1), 129–152. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art7>
- Dahlan, D. (2021). Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif). *Menara Ilmu*, 15(1), 42–50. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389>
- Farid, A. (2017). Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam. *Экономика Региона*, 32.
- Habibi, A. (2020). Diskursus Etika Aristoteles dalam Islam. *Mawa 'Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 11(1), 97–122. <https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1021>
- Hadi, R. T., & Arrasyid, A. (2021). Etika Politik Aristoteles: Kohesivitas Etika dan Politik. *Jurnal Al-Aqidah*, 13(2), 200–213. <https://doi.org/10.15548/ja.v13i2.3398>
- In'amuzzahidin, M. (2016). Etika Politik Dalam Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(2), 89. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>
- Jayus, J. A. (2019). Etika Berbangsa Dalam Mewujudkan, no. November, 1–10.
- Lakonawa, P. (2013). Agama dan Pembentukan Cara Pandang Serta Perilaku Hidup Masyarakat. *Humaniora*, 4(2), 790. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3507>

- Luthfi, F. (2011). Konsep Politik Islam Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Qur'an.
- Mindarto. (2018). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34, 1–87.
- Muhammaddiah, M. R. (2022). Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3967>
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Nizar, R. (2018). Hubungan Etika Dan Agama Dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Arajang*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.31605/arajang.v1i1.44>
- Novianto, & Prihatin, A. (2018). Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Etika Politik Islam Tahun 1930-1960. *Jurnal Prodi Sejarah*, 3(1), 94–106.
- Pattimahu, M. A. (2019). Hubungan_Timbal_Balik_Antara_Islam_dan_P.pdf.
- Prayogi. (2014). Etika Profesi & Hukum Keperawatan, 1–20.
- Rahmatunnair. (2015). Formalization of an Islamic Law Paradigm in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 99–108. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>
- Safitri, P. M. (2015). Etika Pemerintahan Dan Politik.
- Sugiyono. (2022). Kontekstualisasi Etika Politik Islam. *Al Aqidah: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 41–47.
- Sukmana, R. A., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 8(2), 17–32. <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>
- Suparyanto, & Rosad. (2020). Etika Politik Islam. *Suparyanto dan Rosad*, 5(3), 248–253.
- Sutisna, U. (2019). Etika Berbangsa Dan Bernegara Dalam Islam. *Alashriyyah*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i2.92>
- Syam, M. B. (2015). Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M). *Kritis Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 157–174.
- Tina, A. (2023). Revolusi Etika Politik Teori Filsafat Kontemporer Terhadap Konsep Etika Ibn Sina. *Jurnal Siginjai*, 3(1), 50–65. <https://doi.org/10.22437/js.v3i1.24880>
- Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 5(1), 70–88. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>
- Waspiah, W., Arifin, R., Putri, N. M., Safarin, M. H. A. F., & Putri, D. D. P. (2022). Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law Students in a Challenging Era. *Journal of Creativity Student*, 7(2), 133–154. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>
- Yusuf, M., Ulum, B., Rusydi, M., & Ishak, M. (2017). Etika Islam Dalam Ranah Politik: Respon dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung, 2005-2015. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 41(1), 139–154. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.306>

Zildjianda. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1>